

# Hasil Laporan Evaluasi

Instansi : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  
 Nama Inspektur : Inspektorat Provinsi Sumatera Barat  
 Waktu Pengisian : 2017-05-03 09:57  
 Waktu Pengevaluasian :  
 Tahap : Tahap 3 \*)  
 Tahun Penilaian : 2017

Penilaian		Penjelasan	Jawaban	Nilai	Presentase (Bobot / Nilai)	Nama/ Nomor Dokumen Pendukung
<b>A. PROSES (60).</b>				<b>54.19</b>	90.31%	
<b>I.Manajemen Perubahan</b>				<b>4.4</b>	87.93%	
<b>1. Tim Reformasi Birokrasi</b>				<b>0.89</b>	89%	
a	Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk	a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi namun belum sesuai kebutuhan organisasi c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi	A	1		SK Gubernur Sumbar No.700-603-2017 tentang pembentukan tim pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi
b	Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi	a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja d. Seluruh tugas belum dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja	A	1		Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja terlampir Notulen Pembahasan PMPRB dan kesepakatan assesor tahun 2017
c	Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti	a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti d. Seluruh rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi	B	0.67		Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti terlampir Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumbar 2016
<b>2. Road Map Reformasi Birokrasi</b>				<b>0.93</b>	93.4%	
a	Road Map telah disusun dan diformalkan	Road Map telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal	Ya	1		Road Map telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal terlampir Pergub Sumbar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
b	Road Map telah mencakup 8 area perubahan	a. 4 area atau lebih b. 1-3 area c. tidak ada	A	1		Mencakup 4 Area Perubahan terlampir Pergub Sumbar No.85 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

	c	Road Map telah mencakup "quick win"	a. Quick win ada sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat b. Quick win ada tapi tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak dapat diselesaikan dalam waktu cepat c. Belum ada quick win	A	1		Quick win ada sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat terlampir Pergub Sumbar No. 85 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
	d	Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh unit organisasi	a. Seluruh unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map b. Sebagian besar unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map c. Sebagian kecil unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map d. Belum ada organisasi yang dilibatkan dalam penyusunan Road Map	B	0.67		Sebagian besar unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map terlampir Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Road Map RB Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021
	e	Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map kepada anggota organisasi	a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map d. Seluruh anggota organisasi belum mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map	A	1		Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map terlampir Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi RB 2016
<b>3. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi</b>					1.91	95.29%	
	a	PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik	a. Seluruh PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik b. Sebagian besar PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik c. Sebagian kecil PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik d. Seluruh PMPRB belum direncanakan dan diorganisasikan dengan baik	A	1		PMPRB telah direncanakan dengan baik. Terlampir 1.Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 700-298-2013 tentang Penunjukan koordinator Asesor dan Asesor PMPRB di Lingkungan Pemprov Sumbar 2. Keputusan Gubernur Sumbar Nomor: 700-603-2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana PMPRB
	b	Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja	a. Seluruh aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi b. Sebagian besar aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi c. Sebagian kecil aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi d. Seluruh aktivitas PMPRB belum dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi	B	0.67		Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja, terlampir 1. Surat No. 700/394/Insp-SP/2017 tentang Penyampaian datar pertanyaan Evaluasi RB 2. Surat No. 700/420/Insp-SP/2017 tanggal 22 Mei 2017 perihal Undangan Pembahasan PMPRB 3. Notulen Rapat Pembahasan PMPRB 4. Daftar Hadir Pembahasan PMPRB
	c	Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asesor PMPRB	a. Seluruh Tim Asesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan b. Sebagian besar Tim Asesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan c. Sebagian kecil Tim Asesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan d. Seluruh Tim Asesor PMPRB belum mendapatkan pelatihan	A	1		Tim Asesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan. Terlampir 1.Surat Nomor 700/378/Insp-SP/2013 pada tanggal 22 Mei 2013 tentang Pemanggilan Peserta Workshop Asesor PMPRB. 2 Daftar Hadir peserta Workshop Asesor PMPRB, 3.Uraian Kegiatan 4. Register Peserta 5. Biodata Nara Sumber 6.Pidato Gubernur pada acara workshop PMPRB
	d	Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku	a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB. b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB. c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain d. Partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB belum ada.	A	1		Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB . Terlampir 1. Keputusan Inspektur Sumbar Nomor : 700/17/SK-Insp/2017 tentang Pembentukan kelompok kerja PMPRB Inspektorat Daerah Prov. Sumbar 2. Konsensus Assessor
	e	Apakah koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi?	a. Koordinator asesor telah melakukan reviu terhadap seluruh kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi b. Koordinator asesor telah melakukan reviu terhadap sebagian kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi c. Koordinator asesor belum melakukan reviu kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi	A	1		Koordinator asesor telah melakukan reviu terhadap kertas kerja. Terlampir 1.Hasil Evaluasi 2. LKE RB

	f	Apakah para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi?	a. Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas b. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas; c. Belum ada konsensus yang dicapai oleh para koordinator assessor	A	1		Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas ,terlampir Konsensus assessor PMPRB Tahun 2017 Pemerintah Provinsi Sumbar
	g	Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan	a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum dikomunikasikan dan dilaksanakan c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)	A	1		Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan, terlampir 1. Surat No. 700/394/Insp-SP/2017 tentang Penyampaian datar pertanyaan Evaluasi RB 2. Surat No. 700/420/Insp-SP/2017 tanggal 22 Mei 2017 perihal Undangan Pembahasan PMPRB 3. RATL Tahun 2017
<b>4. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja</b>					0.67	66.67%	
	a	Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	a. seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi b. sebagian besar pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi c. sebagian kecil pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi d. Seluruh jajaran pimpinan tertinggi belum terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi	B	0.67		Sebagian besar pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi terlampir SK Gubernur Sumbar No. 700-603-2017 tentang pembentukan Tim Pelaksana PMPRB
	b	Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan	a. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala b. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait c. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai d. Ada media komunikasi namun cakupannya terbatas pada pegawai tingkatan tertentu e. Belum ada media komunikasi untuk mensosialisasikan pelaksanaan reformasi birokrasi	A	1		Terlampir 1. Daftar Domain dan Sub Domain SKPD pada Website resmi Provinsi Sumatera Barat (www.Sumbarprov.go.id). 2. Daftar Publikasi Media Cetak Pemprov sumbar Tahun 2015. 3. Rekapitulasi acara Dialog interaktif dan Society di LPP TVRI dan TV lokal. 4. Dokumentasi Baliho. 5. DPA Kegiatan Penyelenggaraan Desiminasi Informasi. 5. WhatsApp.
	c	Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model	a. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi, dan sudah mengikuti pelatihan sebagai role model dalam perubahan b. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change namun secara formal belum dilakukan d. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of Change	C	0.33		Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change namun secara formal belum dilakukan terlampir surat Nomor 065/999/ORG-2017 perihal Penyampaian Nama Anggota Tim Asistensi Pelaksanaan RB
<b>Rencana Aksi</b>			Pelaksanaan monitoring, Evaluasi, dan tindak lanjutnya				
<b>II. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>					3.13	62.5%	
<b>1. Harmonisasi</b>					1.25	50%	
	a	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron	a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron	B	0.5		Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron terlampir data dukung Terlampir 1. SK Gubernur Sumatera Barat No. 180-468-2016 tentang Pembentukan tim kajian dan harmonisasi produk hukum daerah Provinsi Sumatera Barat. 2. daftar inventarisasi perda yang ditindaklanjuti untuk disesuaikan/diganti/dibatalkan

	b	Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron	a. Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis b. Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah dilakukan, namun belum selesai c. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron	B	0.5		telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron, terlampir data Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah No.188.34/6882/OTDA Perihal:Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah dan Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah No.188.34/6881/OTDA Hal.Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah dan telah diadakannya Rapat kajian dan harmonisasi produk hukum daerah Provinsi Sumatera Barat dilampirkan dengan undangan dan daftar hadir peserta.
<b>2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan</b>					1.88	75%	
	a	Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi	a. Seluruh persyaratan lengkap dan diimplementasikan b. Ada persyaratan tersebut namun baru sebagian diimplementasikan c. Ada persyaratan tersebut namun belum diimplementasikan d. Belum ada persyaratan tersebut	A	1		Terlampir. 1.Surat Nomor 180/1558/Huk-2015 pada tanggal 6 Agustus 2015 tentang undangan rapat ttg klarifikasi, daftar hadir dan notulen rapat 2. Surat Nomor 188/1645/Huk-2015 pada tanggal 14 Agustus 2015 ttg Pengembalian Draf Ranperda. 3. Naskah Akademik Ranperda Prov Sumbar tentang Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan. 4. Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan.
	b	Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	a. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tidak berkala c. Belum pernah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	B	0.5		Terlampir 1. Nota Dinas Nomor 180/849/Huk-2016 pada tanggal 14 April 2016 tentang Pembahasan Penyempurnaan SOP Biro Hukum. 2. Daftar Hadir, 3.Notulen Rapat pada tanggal 22 April 2016.dan Standar Operasional Prosedur Admsitrasi Pemerintahan Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov Sumatera Barat
<b>Rencana Aksi</b>			Pengendalian dalam penyusunan peraturan pewrundangan				
<b>III.PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI</b>					5.17	86.11%	
<b>1. Evaluasi</b>					2	72.22%	
	a	Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unit organisasi b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada sebagian unit organisasi c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada unit organisasi	A	1		Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unit organisasi terlampir Perda Prov.Sumbar no.8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Prov.Sumbar
	b	Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi	a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada sebagian unit organisasi c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada unit organisasi	A	1		Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi terlampir Perda Prov.Sumbar No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Sumbar

	c	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada unit kerja	B	0.5		Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada sebagian unit kerja terlampir contoh antara Biro dan dinas,ditetapkan bahwa Biro bertugas menyusun kebijakan dan Dinas Pelaksana Kebijakan (Pergub Sumbar No. 78 Tahun 2016)
	d	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada unit kerja	A	1		Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja terlampir contoh; Dinas KOMINFO dipisahkan dengan Dinas Perhubungan.Pergub Sumbar no.78 tahun 2016 tentang kedudukan susunan Organisasi , tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Daerah Prov.Sumbar
	e	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada unit kerja	A	1		Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada seluruh unit kerja terlampir Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 821/1542/BKD-2017 (contoh)
	f	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada unit kerja	A	1		Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada seluruh unit kerja terlampir Penataan OPD baru berdasarkan PP 18 Tahun 2016 dan Daftar Perubahan OPD dalam Perda No. 8 Tahun 2016
	g	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat	a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada unit kerja	A	1		Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada seluruh unit kerja terlampir Penataan OPD baru berdasarkan PP 18 Tahun 2016 dan Daftar Perubahan OPD dalam Perda No. 8 Tahun 2016
	h	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain	Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain	Tidak	0		
	i	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	Tidak	0		
	2. Penataan				3	100%	
	a	Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi d. Seluruh hasil evaluasi belum ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	A	1		Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi terlampir Perda Prov.Sumbar No.8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov.Sumbar
	<b>Rencana Aksi</b>		penataan dan evaluasi				
	<b>IV.PENATAAN TATALAKSANA</b>					4.38	87.63%
	1. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama				1.38	91.75%	

	a	Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	a. Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi b. Sebagian besar unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi c. Sebagian kecil unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi d. Seluruh unit organisasi belum memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	A	1		Sebagian besar unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi terlampir Pemetaan SOP Biro Org.
	b	Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)	a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP	A	1		Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP terlampir Keputusan Gubernur No.065-1232/2016 Tentang Perubahan atas keputusan Gub Nomor 065-578-2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Sumbar
	c	Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	a. Seluruh unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) b. Sebagian besar unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) c. Sebagian kecil unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) d. Seluruh unit organisasi belum menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)	A	1		Seluruh unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) terlampir Contoh SOP pada Biro Organisasi dan laporan evaluasi penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pada pemerintah provinsi dan kab/kota
	d	Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi	a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan prosedur operasional	B	0.67		Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti terlampir laporan evaluasi penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pada pemerintah provinsi dan kab/kota
<b>2. E-Government</b>					1.51	75.25%	
	a	Sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi	Ya, apabila sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi	Ya	1		Rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi telah ada, terlampir 1. Buku E-Government 2. Dokumen Rencana Pengembangan Cyber Province
	b	Sudah dilakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll)	a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d. Belum ada pengembangan dan implementasi e-government	B	0.67		Pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi terlampir 1. Buku E-Government 2. Aplikasi siMaya, Digital Front Office, GEMA Nagari
	c	Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan)	a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government	B	0.67		Pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terlampir 1. Buku E-Government 2. Aplikasi OnSmart Sumbar 3. Fitur Pengaduan Masyarakat
	d	Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll)	a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government	B	0.67		Pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional, terlampir 1. Buku E-Government 2. Fitur Layanan Perizinan Online <a href="http://sipsakato.sumbarprov.go.id/main">http://sipsakato.sumbarprov.go.id/main</a>
<b>3. Keterbukaan Informasi Publik</b>					1.5	100%	

	a	Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)	Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik	Ya	1		Kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik telah ada, terlampir Pergub Sumbar No. 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar
	b	Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik	a. Seluruh informasi publik telah dapat diakses b. Sebagian besar informasi publik telah dapat diakses c. Sebagian kecil informasi publik telah dapat diakses d. Seluruh informasi publik belum dapat diakses	A	1		"seluruh informasi publik bisa diakses kecuali yang dikecualikan sesuai UU 14/2008 tentang KIP pasal 17, dan Pergub Sumbar No. 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar, terlampir 1. UU 14/2008 tentang KIP 2. Pergub Sumbar No. 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar 3. ppid.sumbarprov.go.id , "
	c	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	A	1		"Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala, terlampir 1. Laporan pengisian data dan informasi perbulan 2. Surat Sekda No. 489/167/Humas-2015 perihal Verifikasi dan Uji Konsekuensi DIP 3. Surat Sekda No. 555/255/B3/Diskominfo/V/2017 perihal Verifikasi dan Uji Konsekuensi DIP 4. Sk Gubernur tentang pembentukan Tim Pembahasan klasifikasi data umum/dikecualikan dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah provinsi sumatera barat 5. Surat Gubernur Sumbar No. 047/196a/B3/Diskominfo/III/2017 perihal Penyusunan DIP 6. DIP Tahun 2017"
	<b>Rencana Aksi</b>		SOP, E-Government dan keterbukaan informasi publik				
<b>V.PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)</b>					14.86	99.05%	
<b>1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi</b>					1	100%	
	a	Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan	a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian besar jabatan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian kecil jabatan d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan	A	1		Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan terlampir SK Gubernur Sumbar No. 066-124-2013 tentang Penetapan Hasil Analisis Beban Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Sumbar
	b	Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan	a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian besar unit organisasi c. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian kecil unit organisasi d. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan	A	1		Terlampir Susunan perencanaan kebutuhan pegawai ASN tahun 2015
	c	Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan	ya, apabila terdapat dokumen rencana redistribusi pegawai	Ya	1		Terlampir rencana redistribusi pegawai Pemprov
	d	Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan	ya, apabila terdapat dokumen tentang proyeksi kebutuhan 5 tahun	Ya	1		Terlampir proyeksi kebutuhan 5 tahun

	e	Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan	a. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada seluruh unit organisasi b. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian besar unit organisasi c. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian kecil unit organisasi d. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan belum dilakukan	A	1		Perhitungan formasi jabatan telah dihitung untuk seluruh organisasi terlampir buku formasi PNS
<b>2. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN</b>					2	100%	
	a	Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat	a. Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagai media (misal: website, jejaring sosial, dsb) b. Pengumuman penerimaan diinformasikan melalui media secara terbatas (misal: papan pengumuman di kantor) c. Pengumuman penerimaan belum disebarluaskan	A	1		Terlampir Seleksi CPNS 2014
	b	Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online)	Ya, apabila pendaftaran dapat dilakukan secara online dan dapat segera diperoleh informasi mengenai kepastian status pendaftaran.	Ya	1		Terlampir Seleksi CPNS 2014
	c	Persyaratan jelas, tidak diskriminatif	Ya, apabila terdapat kejelasan persyaratan administrasi dan kompetensi. Persyaratan memberikan kesempatan luas kepada masyarakat.	Ya	1		Terlampir Seleksi CPNS 2014
	d	Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN	Ya, apabila proses seleksi jelas kriteria dan prosesnya, tidak terjadi KKN, dan dapat dipertanggungjawabkan.	Ya	1		Terlampir Seleksi CPNS 2014
	e	Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka	Ya, apabila Pengumuman hasil seleksi dapat diakses oleh publik dengan mudah	Ya	1		"Terlampir Keputusan Gubernur No.800/3706/BKD-2014. hasil seleksi dapat diakses melalui www.menpan.go.id dan www.sumbarprov.go.id"
<b>3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi</b>					1	100%	
	a	Telah ada standar kompetensi jabatan	Ya, apabila terdapat kebijakan tentang tentang kompetensi jabatan	Ya	1		Terdapat kebijakan tentang tentang kompetensi jabatan terlampir Pergub Sumbar No 21 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
	b	Telah dilakukan <i>assessment</i> pegawai	a. Telah dilakukan asesment kepada seluruh pegawai b. Telah dilakukan asesment kepada sebagian besar pegawai c. Telah dilakukan asesment kepada sebagian kecil pegawai d. Belum dilakukan asesment pegawai	A	1		"Telah dilakukan asesment pegawai. Terlampir Nota Kesepakatan bersama antara Pemprov dengan UI Tahun 2016"
	c	Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai d. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai	A	1		"Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada pegawai. Terlampir Surat Nomor 826/212/BKD/IV-2015 tanggal 15 Januari 2015"
	d	Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi	a. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi b. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian besar pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi c. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian kecil pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai	A	1		"Terlampir Surat Nomor 826/844/IV-2015 tanggal 11 Februari 2015: Daftar nama tugas belajar DPA/dukungan anggaran" 1 Februari 2015: Daftar nama tugas belajar DPA/dukungan anggaran
	e	Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi	A	1		"Pengembangan berbasis kompetensi telah sesuai rencana terlampir. 1.Surat Nomor 826/844/IV-2015 tanggal 11 Februari 2015: Daftar nama tugas belajar DPA/dukungan anggaran 2.Dokumen penempatan PNS di lingkungan Pemprov Sumbar Pasca Izin Belajar dan Tugas Belajar Tahun 2010-2014 dan tahun 2015"



	f	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	a. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara tidak berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi	A	1		"Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai yang berbasis kompetensi. Terlampir 1. Surat Nomor 826/844/IV-2015 tanggal 11 Februari 2015: Daftar nama tugas belajar 2. dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi"
<b>4. Promosi jabatan dilakukan secara terbuka</b>					6	100%	
	a	Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan	ya, apabila terdapat kebijakan tentang promosi terbuka dan telah ditetapkan	Ya	1		"Terlampir 1. Permenpan nomor 13 tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dilingkungan instansi pemerintah 2. Pergub Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat"
	b	Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan	a. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara nasional b. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara terbatas c. Promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi terbatas pada posisi jabatan pimpinan tinggi pratama d. Belum ada promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi	A	1		"Pengisian jabatan pimpinan tinggi melalui promosi terbuka secara nasional terlampir 1. Pengumuman no. 800/1690/BKD-2017 "
	c	Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif	Ya, apabila pelaksanaan promosi dilakukan dengan cara kompetitif dan penilaian dilakukan secara obyektif	Ya	1		"Promosi dilakukan secara kompetitif dan obyektif terlampir dalam pengumuman seleksi"
	d	Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen	Ya, apabila telah ditetapkan susunan panitia seleksi yang berasal dari pihak-pihak independen	Ya	1		"Telah ditetapkan susunan panitia seleksi independen sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/218/BKD-2017 "
	e	Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka	Ya, apabila tahapan diumumkan secara terbuka melalui media IT seperti website panitia seleksi dsb	Ya	1		"Pengumuman hasil seleksi diberitahukan kepada peserta melalui website"
<b>5. Penetapan kinerja individu</b>					1.86	92.86%	
	a	Penerapan Penetapan kinerja individu	a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai b. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian besar pegawai c. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian kecil pegawai d. Belum ada penerapan penetapan kinerja individu yang telah dilakukan	A	1		Penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai terlampir Formulir sasaran kerja pegawai
	b	Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	a. Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi b. Sebagian besar pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi c. Sebagian kecil pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi d. Belum ada pegawai yang melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	A	1		"penilaian kinerja individu telah dilakukan. Terlampir 1. Draft Pergub Sumatera Barat No. Tahun 2017 tentang Tupoksi BKD dan Pergub Sumbar Tahun 2016 Tentang Tupoksi Serta Tata kerja Badan Daerah"
	c	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya	a. Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya b. Sebagian besar pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya c. Sebagian kecil pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya d. Seluruh pegawai belum memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya	A	1		"Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu sesuai indikator. Terlampir SKP dan penilaian capaian sasaran kerja"
	d	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan	A	1		"Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan terlampir SKP PNS BKD Prov. Sumbar"

	e	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.	a. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara berkala b. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tidak berkala c. Belum ada monev pencapaian kinerja individu	B	0.5		""Terlampir Hasil evaluasi dan monitoring atas pencapaian kinerja individu""
	f	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu	a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian besar pegawai c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian kecil pegawai d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai	A	1		""Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pengembangan karier terhadap pegawai terlampir SKP sebagai bahan pertimbangan perkembangan karier individu""
	g	Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja	a. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai b. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada sebagian besar pegawai c. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada sebagian kecil pegawai d. Capaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai	A	1		"Capaian kinerja individu telah dijadikan untuk pemberian tunjangan kepada seluruh pegawai terlampir IPK PTP 1 pegawai"
<b>6. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai</b>					1	100%	
	a	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan	ya, apabila terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kode perilaku	Ya	1		Terlampir Pergub Sumbar No.55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik
	b	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan	a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi b. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada sebagian besar unit organisasi c. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada sebagian kecil unit organisasi d. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi	A	1		""Aturan disiplin telah diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi terlampir contoh penjatuhan hukuman disiplin PNS sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumbar No.862/3641/BKD-2016""
	c	Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi tidak berkala c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	A	1		"Monitoring dan evaluasi pelaksanaan aturan disiplin telah dilakukan. Terlampir SPT Nomor 800/1237/V/BKD-2016"
	d	Adanya pemberian sanksi dan imbalan ( <i>reward</i> )	a. Adanya pemberian sanksi dan imbalan ( <i>reward</i> ) kepada seluruh unit organisasi b. Adanya pemberian sanksi dan imbalan ( <i>reward</i> ) kepada sebagian besar unit organisasi c. Adanya pemberian sanksi dan imbalan ( <i>reward</i> ) kepada sebagian kecil unit organisasi d. Belum ada pemberian sanksi dan imbalan ( <i>reward</i> ) kepada unit organisasi	A	1		"Terlampir 1. Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 862/937/Sekr-2014 tentang SANKSI 2. Pergub Sumbar Nomor 12 Tahun 2015 tentang REWARD 3. Pergub Sumbar Nomor 39 Tahun 2011 tentang REWARD dan SK Gubernur No.861/2443/V/BKD-2016 tentang Penetapan PNS berprestasi"
<b>7. Pelaksanaan evaluasi jabatan</b>					1	100%	
	a	Informasi faktor jabatan telah disusun	Ya, apabila terdapat dokumen tentang penyusunan Faktor Jabatan	Ya	1		Terdapat dokumen tentang penyusunan Faktor Jabatan terlampir Informasi Faktor Jabatan Tahun 2015
	b	Peta jabatan telah ditetapkan	a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan peta jabatan b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan peta jabatan c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan peta jabatan d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan peta jabatan	A	1		Seluruh unit organisasi telah menetapkan peta jabatan terlampir Peta Jabatan Semua OPD Tahun 2015
	c	Kelas jabatan telah ditetapkan	a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan kelas jabatan	A	1		Seluruh unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan terlampir Rekapitulasi Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai Tahun 2015
<b>8. Sistem Informasi Kepegawaian</b>					1	100%	
	a	Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan	Ya, apabila terdapat sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan	Ya	1		Print Screen Aplikasi Sistem Kepegawaian
	b	Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai	Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian	Ya	1		Print Screen Halaman Web

	c	Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan	a. Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian b. Sebagian besar unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian c. Sebagian kecil unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian d. Seluruh unit organisasi belum memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian	A	1		Print screen pemutakhiran sistem informasi kepegawaian (sebelum-sesudah di mutakhirkan)
	d	Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM	Ya, apabila sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM	Ya	1		Simpeg telah digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM, terlampir Print Screen Laman web Simpeg , contoh: link-Penilaian kinerja PNS
		<b>Rencana Aksi</b>	objektif dan akuntabilitas				
<b>VI. PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>					5.8	96.67%	
<b>1. Keterlibatan pimpinan</b>					2	100%	
	a	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	A	1		Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra terlampir Kep Gubernur Nomor 065- 26- 2016 tentang Pembentukan Tim Akuntabilitas Kinerja Pemda Prov Sumbar Tahun 2016 dan SK TIM Akuntabilitas pada masing-masing OPD
	b	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	A	1		Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja terlampir Keputusan Gubernur Nomor 065- 094- 2016 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi, Perjanjian Kinerja SKPD Prov Sumbar dan Perjanjian Kinerja Pejabat Ess III dan serta Ess IV pada masing-masing SKPD Prov Sumbar Tahun 2016
	c	Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	a. Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala b. Sebagian besar pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala c. Sebagian kecil pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala d. Seluruh pimpinan belum memantau pencapaian kinerja secara berkala	A	1		Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala terlampir notulen rapat pembahasan/verifikasi pengukuran kinerja SKPD dan Pengukuran kinerja Pemprov Sumbar tahun 2015 tw1 dan tw2
<b>2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja</b>					3.8	95%	
	a	Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	a. Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja b. Sebagian besar unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja c. Sebagian kecil unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja d. Seluruh unit organisasi belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	A	1		Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja terlampir Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis SAKIP Provinsi dan Kabupaten/Kota
	b	Apakah pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun	Ya, apabila terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja	Ya	1		Terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja terlampir Pergub 65 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemda Prov Sumbar
	c	Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik	a. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan terintegrasi b. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum terintegrasi c. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belum implementasi d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik	A	1		Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan terintegrasi terlampir E -SAKIP (sakip.sumbarprov.go.id)

	d	Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit	a. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi b. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi c. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi	A	1		Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi terlampir 1. sakip.sumbangprov.go.id 2. surat pengisian E-Sakip ke seluruh OPD
	e	Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala	a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunan e. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan	B	0.75		Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan terlampir 1. sakip.sumbangprov.go.id 2. surat pengisian E-Sakip ke seluruh OPD
<b>Rencana Aksi</b>			Telaksana penguatan akuntabilitas				
<b>VII. Penguatan Pengawasan</b>							
<b>1. Gratifikasi</b>					1.5	95.02%	
	a	Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi	Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan gratifikasi	Ya	1		Kebijakan penanganan gratifikasi telah ditetapkan terlampir Pergub Sumbar No. 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
	b	Telah dilakukan public campaign	a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign	A	1		Public Campaign telah dilakukan secara berkala terlampir 1. Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumbar 2. DPA tahun 2015, 2016 dan 2017 3. Surat Sekda No. 700/345/Insp-SE/2017 tanggal 13 Mei 2016 perihal Undangan Implementasi Pengendalian Gratifikasi 4. Surat No. 700/525 /Insp-SE/2016 perihal Undangan 5. Daftar Hadir Implementasi Pengendalian Gratiikasi dan Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi 6. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pencanangan pemakaian pin "AYO Tolak Gratifikasi" 7. Daftar Hadir Pencanangan pin "AYO Tolak Gratifikasi 8. Tanda terima Surat Instruksi Gubernur Nomor 2/INST/2017 tentang Pemakaian pin "Ayo!! Tolak Gratifikasi" bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di lingkungan Pemerintah Proivinsi Sumatera Barat, Surat SK TLHP No. 700/276.Insp-SE/2017 dan PIN Gratifikasi
	c	Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan	Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi	Ya	1		Penanganan Gratifikasi telah diimplementasikan terlampir 1. Surat Dinas Sosial No. 14 Desember 2016 perihal Laporan Penerimaan/Penolakan Gratifikasi Dinas Sosial 2. Surat Dinas Sosial No. 050/1002/Dinsos/2017 tanggal 3 Mei 2017 perihal Laporan Penerimaan/Penolakan Gratifikasi Dinas Sosial 3. Surat RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi No. 445/04003/RSAM/2017 tanggal 18 April 2017 perihal konsultasi gratifikasi 4. Surat No. 700/447/Insp-SE/2017 tanggal 31 Mei 2017 Perihal Laporan Penerimaan/Penolakan Gratifikasi

	d	Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Ya	1		Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi terlampir 1. Pergub Sumbar No. 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi pada Pemprov. Sumbar Tahun 2017
	e	Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti	Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut	Ya	1		Hasil Monitoring dan Evaluasi UPG telah ditindak lanjuti terlampir Surat Inspektorat No. 700/361/Insp-SE/2017 tanggal 25 April 2017 perihal Jawaban Konsultasi Mengenai Gratifikasi
<b>2. Penerapan SPIP</b>					1.5	100%	
	a	Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP	Ya, apabila ada peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP	Ya	1		Telah terdapat peraturan tentang SPIP, terlampir 1. PP RI No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP 2. Pergub No. 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan SPIP
	b	Telah dibangun lingkungan pengendalian	a. Seluruh organisasi telah membangun lingkungan pengendalian b. Sebagian organisasi telah membangun lingkungan pengendalian c. Seluruh organisasi belum membangun lingkungan pengendalian	A	1		Seluruh Organisasi telah membangun lingkungan pengendalian. Terlampir 1. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700-124-2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi SPIP Pemerintah Provinsi Sumbar Tahun 2017 2. Keputusan Inspektur No. 700/09/SK-INSP/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi SPIP Inspektorat Provinsi Sumbar Tahun 2016
	c	Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi	a. Seluruh organisasi telah melaksanakan penilaian risiko b. Sebagian besar organisasi telah melaksanakan penilaian risiko c. Sebagian kecil organisasi telah melaksanakan penilaian risiko d. Seluruh organisasi belum melaksanakan penilaian risiko	A	1		"Penilaian Risiko telah dilaksanakan. Terlampir Dokumen SPIP ""Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2017"" Inspektorat Provinsi Sumatera Barat"
	d	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	a. Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi b. Sebagian besar organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi c. Sebagian kecil organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi d. Seluruh organisasi belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	A	1		Pengendalian Risiko telah dilaksanakan. Terlampir Dokumen SPIP "Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2017" Inspektorat Provinsi Sumatera Bara
	e	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian kecil pihak terkait d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI	A	1		SPI telah diinformasikan kepada seluruh pihak terkait. Terlampir 1. Daftar hadir Sosialisasi Implementasi SPIP "Pembahasan Penilaian Risiko dan Pemetaan Risiko Pada Tataran Kegiatan SKPD 2. Dokumen SPIP "Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2017" Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
	f	Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern	a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern	A	1		Pemantauan pengendalian Intern telah dilakukan, terlampir 1. Surat Tugas No. 700/105/INSP-SAU/2017 2. Surat Sekda No. 700/169/Insp-SE/2017 tanggal 21 Februari 2017 perihal Percepatan Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP 3. Dokumen SPIP "Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2017" Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
<b>3. Pengaduan Masyarakat</b>					2	100%	

	a	Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat	Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan	Ya	1		Kebijakan pengaduan masyarakat telah disusun, terlampir Peraturan Gubernur Sumbar No. 42 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah di Prov. Sumbar
	b	Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	a. Seluruh unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat b. Sebagian besar unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat c. Sebagian kecil unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat d. Seluruh unit organisasi belum mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat	A	1		Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan. Terlampir 1. Rekap Penanganan Pengaduan Masyarakat yang Telah di Tindaklanjuti Tahun 2014- 2016 2. Contoh Surat Pengaduan Masyarakat Tahun 2016 3. Peraturan Gubernur Sumbar No. 42 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah di Prov. Sumbar
	c	Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti d. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti	A	1		Penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti. Terlampir Rekap Penanganan Pengaduan Masyarakat yang Telah di Tindaklanjuti Tahun 2014- 2016
	d	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan pengaduan masyarakat belum dimonitoring dan dievaluasi	A	1		Telah dilakukan Monitoring dan evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat secara berkala. Terlampir Laporan Pengaduan Masyarakat Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2016.
	e	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	Ya	1		Hasil evaluasi Penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti . Terlampir Rekap Penanganan Pengaduan Masyarakat yang Telah di Tindaklanjuti Tahun 2014- 2016
<b>4. Whistle-Blowing System</b>					1.15	76.8%	
	a	Telah terdapat Whistle Blowing System	Ya, apabila terdapat kebijakan tentang Whistle Blowing System	Ya	1		"Kebijakan tentang Whistle Blowing System telah ada, terlampir SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 700-521-2013 tentang Penetapan Penyelenggaraan Whistle Blowing System Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sumatera Barat."
	b	Whistle Blowing System telah disosialisasikan	a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh organisasi b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar organisasi c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil organisasi d. Whistle blowing system belum disosialisasikan ke seluruh organisasi	B	0.67		"WBS telah disosialisasikan. Terlampir Surat Nomor 700/569/Insp-SAU/2014 pada tanggal 7 Oktober 2014 tentang Sosialisasi Whistle Blowing System BPJB Pemerintah"
	c	Whistle Blowing System telah diimplementasikan	Ya, apabila kebijakan whistle blowing system telah diimplementasikan	Ya	1		"Terlampir Print Screen halaman Whistle Blowing System"
	d	Telah dilakukan evaluasi atas Whistle Blowing System	a. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System	B	0.5		"WBS telah di evaluasi. Terlampir Nota Dinas pada tanggal 18 Agustus 2015 tentang Laporan Hasil Evaluasi Whistle Blowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sumbar"
	e	Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	a. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti d. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti	B	0.67		"Hasil WBS telah ditindaklanjuti. Terlampir Surat Nomor 700/387/Insp-SAU/2015 pada tanggal 20 Agustus 2015 tentang Informasi tentang Whistle Blowing System Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sumbar"
<b>5. Penanganan Benturan Kepentingan</b>					1.5	100%	

	a	Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan	Ya, apabila terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan	Ya	1		Telah terdapat peraturan penanganan benturan kepentingan, terlampir Pergub Sumbar No. 41 Tahun 2016 tentang Tatacara Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Prov. Sumbar
	b	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan	a. Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke seluruh unit organisasi b. Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke sebagian besar unit organisasi c. Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke sebagian kecil unit organisasi d. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan ke seluruh unit organisasi	A	1		Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan, terlampir 1. Surat Inspektorat No. 700/520/Insp-SP/2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang Pengiriman Pergub No. 41 Tahun 2016 2. Printscreen website www.sumbarprov.go.id
	c	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Ya	1		Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan, terlampir Surat Sekda No. 700/594/Perek-2017 tanggal 26 Mei 2017 perihal Penyampaian Data Penanganan Benturan Kepentingan
	d	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan Benturan Kepentingan belum dimonitoring dan evaluasi	A	1		Penanganan Benturan Kepentingan telah dimonitoring dan dievaluasi, terlampir surat Inspektorat No. 700/421/Insp-SP/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Permintaan Data Penanganan Benturan Kepentingan
	e	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti d. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan belum ditindaklanjuti	A	1		Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti, terlampir Rekapitulasi Tindakanjuti Benturan Kepentingan
<b>6. Pembangunan Zona Integritas</b>					2.25	90%	
	a	Telah dilakukan penancangan zona integritas	Ya, apabila terdapat Dokumen Penancangan Zona Integritas ditandatangani sesuai ketentuan	Ya	1		Telah dilakukan penancangan zona integritas, terlampir piagam penancangan pembangunan zona integritas
	b	Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas	Ya, apabila ada Surat Keputusan Tentang unit yang ditetapkan	Ya	1		Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas, terlampir Keputusan Gubernur Sumbar No. 700-879-2016 tentang Penetapan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dan BKPM dan PPT Prov. Sumbar sebagai Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Berintegritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar
	c	Telah dilakukan pembangunan zona integritas	a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif b. Pembangunan zona integritas dilakukan tidak secara intensif c. Belum ada pembangunan zona integritas	A	1		Telah dilakukan pembangunan zona integritas, terlampir 1. SK Gubernur Sumbar No. 700-375-2016 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Penilaian Internal terhadap unit kerja yang akan diusulkan menjadi WBK 2. Laporan Kegiatan ZI Tahun 2016

	d	Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan	a.Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Zona integritas yang telah ditentukan belum dimonitoring dan dievaluasi	A	1		Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan, terlampir 1. LKE Evaluasi ZI menuju WBK/WBBM 2. Nota Dinas Inspektur No. 700/373/Insp-SE/2016 tanggal 14 Desember 2016 perihal Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM 3. Surat Gubernur Sumbar No. 700/890/Insp-SE/2016 tanggal 21 Desember 2016 Hal Laporan Penilaian Mandiri Unit Kerja Berpredikat WBK 4. SK Gubernur Sumbar No. 700-375-2016 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Penilaian Internal Terhadap Unit Kerja yang akan diusulkan menjadi WBK
	e	Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai "menuju WBK/WBBM"	a. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBBM b. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK c. Belum terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK	B	0.5		Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK, terlampir 1. Piagam Penetapan Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi 2. Photo penandatanganan oleh Karyawan RSUD Dr. Achmad Mochtar di Spanduk Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
<b>7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)</b>					1.5	100%	
	a	Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan	a. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir b. Sebagian rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir c. Sebagian kecil rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir d. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan belum ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir	A	1		Rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti. Terlampir 1.Nota Dinas Nomor : 700/12/Insp-SE/2016 tentang Penandatanganan Surat Peringatan 1 TLHP Inpektorat Provinsi Sumbar 2. Surat Nomor :700/63/Insp-SE/2016 tentang TLHP Inspektorat Provinsi 3. Surat Nomor: 900/0094-1/2016 tentang TLHP Inspektorat Provinsi 4. Berita Acara Pembahasan TLHP Inspektorat Sumbar
	b	APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas.	a. Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas	A	1		APIP telah di dukung dengan SDM yang memadai secara kuantitas dan kualitas. Terlampir DUK Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi
	c	APIP didukung dengan anggaran yang memadai	a. Seluruh kebutuhan didukung oleh anggaran b. Sebagian besar kebutuhan didukung oleh anggaran c. Sebagian kecil kebutuhan didukung oleh anggaran d. Seluruh kebutuhan belum didukung oleh anggaran	A	1		Seluruh kebutuhan APIP didukung dengan anggaran yang memadai. Terlampir DPA tahun 2017 tanggal 04 Januari 2017
	d	APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko	a. Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum berfokus pada client dan audit berbasis risiko	A	1		Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko, terlampir 1. PKPT berbasis risiko Tahun 2017 berbasis risiko 2. Dokumen Audit Berbasis Risiko Tahun 2017 Inspektorat Prov. Sumbar
<b>Rencana Aksi</b>			Peningkatan Penguatan Pengawasan				
<b>VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>					5.06	84.32%	
<b>1. Standar Pelayanan</b>					0.77	76.8%	



	a	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Ya, apabila telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan perijinan	Ya	1		Terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan perijinan terlampir Pergub No.70 Tahun 2016 tentang tata cara penyusunan, penetapan, standar pelayanan, dan pengukuran penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik
	b	Standar pelayanan telah dimaklumkan	a. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan b. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian besar jenis pelayanan c. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian kecil jenis pelayanan d. Standar pelayanan belum dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan	B	0.67		Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian besar jenis pelayanan terlampir Maklumat Pelayanan Biro Organisasi serta Foto Maklumat
	c	Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	a. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan b. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian besar jenis pelayanan c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian kecil jenis pelayanan d. Belum terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	B	0.67		Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian besar jenis pelayanan terlampir Standar pelayanan di Biro Organisasi
	d	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara tidak berkala dan/atau tidak dengan melibatkan stakeholders c. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	B	0.5		Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara tidak berkala dan/atau tidak dengan melibatkan stakeholders terlampir Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	e	Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP	a. Dilakukan reviu dan perbaikan SOP secara berkala b. Dilakukan reviu dan SOP secara tidak berkala c. Belum ada reviu dan perbaikan SOP	A	1		Keputusan Gubernur No. 065-1232/2016
<b>2. Budaya Pelayanan Prima</b>					1	100%	
	a	Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima)	a. Seluruh sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima d. Seluruh sosialisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima	A	1		Seluruh sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima terlampir Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Sumatera Barat tahun 2015
	b	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb) b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb) c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media	A	1		"Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media, terlampir 1. stiker call center pelayanan jaringan pemprov sumbar 2. simiko.sumbarprov.go.id 3. PPID online di alamat PPID.sumbarprov.go.id 4. laman Facebook Biro Organisasi Setda Provinsi Sumbar 5. Foto Banner Pelayanan pada Inspektorat Prov. Sumbar "
	c	Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	A	1		Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan terlampir Laporan Pelaksanaan kegiatan Kompetisi Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016
	d	Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu	A	1		Terlampir Perda No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Prov. Sumbar dan Instruksi Gubernur Sumbar Nomor 120.4/57-PERIZ/DPM&PTSP/V/2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov Sumbar

	e	Terdapat inovasi pelayanan	Ya, apabila terdapat bukti inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi penerima pelayanan	Ya	1		Aplikasi OnSmart, Whatsapp
<b>3. Pengelolaan Pengaduan</b>					1.4	93.4%	
	a	Terdapat media pengaduan pelayanan	Ya, apabila telah ditetapkan media pengaduan pelayanan secara jelas dan terbuka	Ya	1		Telah ditetapkan media pengaduan pelayanan secara jelas dan terbuka, terlampir dokumentasi Kotak Pengaduan Pelayanan di depan Media Center, Kantor Inspektorat, Sumbarprov.go.id
	b	Terdapat SOP pengaduan pelayanan	a. Terdapat SOP pengaduan pelayanan secara komprehensif b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan namun belum seluruhnya c. Belum ada SOP pengaduan pelayanan	A	1		SOP pengaduan pelayanan secara komprehensif terlampir SOP Pengaduan Pelayanan Publik
	c	Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan	ya, apabila telah ditetapkan unit pengelola pengaduan	Ya	1		Telah ditetapkan unit pengelola pengaduan pelayanan terlampir Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 065-398-2017
	d	Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan b. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan c. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan d. Belum dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	B	0.67		Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan terlampir Notulen rapat penyelesaian sengketa
	e	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan / masukan	a. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan tidak berkala c. Belum ada evaluasi penanganan keluhan / masukan	A	1		Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan secara berkala terlampir Laporan kegiatan monev penanganan pengaduan pelayanan publik
<b>4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan</b>					1	66.67%	
	a	Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	A	1		Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala terlampir Surat Gubernur Sumbar Nomor 065/306/Org-2016 perihal Survei Kepuasan Masyarakat
	b	Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Ya, apabila tersedia media untuk mengakses data hasil survey dengan mudah	Tidak	0		
	c	Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	A	1		Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat terlampir Contoh Janji Perbaikan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016
<b>5. Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>					0.89	89%	
	a	Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	Ya, apabila ada rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	Ya	1		Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan, Terlampir 1. Rencana Pengembangan Cyber Province 2012 2. Buku e-government Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
	b	Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	a. Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan b. Sebagian besar pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan c. Sebagian kecil pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan d. Seluruh pelayanan belum menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	B	0.67		Sebagian besar pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan, terlampir 1. sumbarprov.go.id 2. ppid.sumbarprov.go.id

	c	Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus c. Belum dilakukan perbaikan	A	1		Perbaikan pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara terus-menerus, terlampir 1. DPA Perbaikan Jaringan 2. nota dinas perihal persetujuan pencairan dana pemeliharaan perlatan jaringan 3 .beberapa lampiran nota dinas permohonan perbaikan dari stakeholder
		<b>Rencana Aksi</b>	Manfaat teknologi informasi				
<b>B. HASIL</b>						<b>23.47</b>	<b>58.66%</b>
<b>I. KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI</b>						<b>10.04</b>	<b>50.2%</b>
		1.Nilai Akuntabilitas Kinerja	Diisi dengan nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (0 - 100)	71.72	10.04		Surat Kementerian PAN dan RB Nomor B/506/M.AA.05/2017 Tanggal 16 Februari 2017
		2.Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal)	Diisi dengan nilai hasil Survei Internal Kapasitas Organisasi (0 - 5)	0	0		
		<b>Rencana Aksi</b>	Kapasitas kinerja organisasi				
<b>II. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN</b>						<b>6.5</b>	<b>65%</b>
		1.Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi (0 - 4)	2	3.5		Tranparency International Indonesia
		2.Opini BPK	Wajar Tanpa Pengecualian WTP-Dengan Paragraph Penjelasan Wajar Dengan Pengecualian Tidak Memberikan Pendapat Tidak Wajar Tidak Memiliki Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian	3		Terlampir Surat BPK menyatakan WTP .Surat Nomor 41 /S-HP/XVIII.PDG/05/2017 pada tanggal 22 Mei 2017 tentang Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016
		<b>Rencana Aksi</b>	Bersih bebas KKN				
<b>III. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>						<b>6.93</b>	<b>69.25%</b>
		1.Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan (0 - 4)	2.77	6.925		Terlampir surat Ombudsman RI kepada Gubernur Sumbar pada tanggal 14 Desember 2015, dengan Nomor surat : 1252/ORI-SRT/XII/2015 tentang Hasil Penelitian kepatuhan atas pelaksanaan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		<b>Rencana Aksi</b>	Kualitas Pelayanan Publik				
<b>INDEKS RB (Total)</b>						<b>77.65</b>	

\*) Tahap Penilaian :

1. Masih dalam proses koordinasi penilaian atau perbaikan penilaian di isnpektorat
2. Sudah disampaikan ke Ketua Tim RB Instansi
3. Sudah dikirim ke Kementerian PAN dan RB